
MODEL IMPLEMENTASI SAK ETAP PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KABUPATEN JEPARA

Fatchur Rohman

Program Studi Akuntansi FEB UNISNU Jepara

E-mail : fatchurstienu@gmail.com

Kata kunci: *Abstrak.*

Laporan Keuangan, SAK ETAP, Credit Union. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi model implementasi SAK ETAP pada Asosiasi Pengusaha Kayu Jepara BMT - HPKJ yang meliputi penyajian laporan keuangan sesuai dengan BMT HPKJ dan SAK ETAP. Metode yang digunakan adalah penyajian deskriptif kuantitatif dari analisis laporan yang telah dilakukan di BMT HPKJ. Hasil analisis menunjukkan bahwa BMT HPKJ tidak menerapkan SAK ETAP secara lengkap, hal itu terlihat dari jenis laporan keuangan yang hanya mencakup neraca dan laba rugi sedangkan komponen laporan keuangan di SAK ETAP meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Arus Kas, Change Capital dan catatan tentang laporan finansial. Sehubungan dengan penyajian BMT HPKJ yang belum sepenuhnya diadopsi untuk penyajian akun dalam penyusunan laporan keuangan tersebut belum lengkap.

Keywords : *Abstract*

Financial Statement, SAK ETAP, Credit Union. This study is a quantitative descriptive research that aims to identify the implementation model of SAK ETAP on the Jepara Timber Entrepreneurs Association BMT - HPKJ which includes presentation of financial statements in accordance with BMT HPKJ and SAK ETAP. The method used is a quantitative descriptive presentation of the reports analysis that has been conducted in BMT HPKJ. The analysis results show that BMT HPKJ does not apply SAK ETAP completely. It can be seen from the type of financial statements that only cover the balance sheet and profit and loss statement, while the components of financial statements in SAK ETAP should include Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow, Change Capital and notes about financial report. In conclusion, the presentation of BMT HPKJ has not been fully adopted for the presentation of accounts in the preparation of the financial statements. =

Pendahuluan

Perkembangan koperasi di Indonesia sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jumlah Koperasi di Kabupaten Jepara mencapai 733 koperasi, namun hanya 607 koperasi yang aktif dan sisanya sebesar 126 koperasi tidak aktif. Adapun yang melaksanakan RAT pada tahun 2014 sebanyak 589 koperasi (Laporan Diskopumkam provinsi per 31 Maret 2015). Melihat perkembangan yang semakin meningkat maka perlu mendapat perhatian secara khusus kaitanya dengan pelaporan koperasi. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal diatas adalah koperasi.

Koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi yang tertuang dalam Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012. Perkembangan koperasi tidak lepas dari adanya kerjasama semua karyawan yang menghasilkan suatu laporan keuangan

yang berkualitas yang sesuai dengan standar, yang membantu manajemen koperasi untuk memperoleh berbagai macam kemudahan. Untuk mencapai suatu laporan yang berkualitas, koperasi menggunakan standar dalam penyusunan laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit koperasi menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SAK ETAP ini cukup sederhana dan tidak menyulitkan penggunaannya.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi yang dapat digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal, contohnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas disebut memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas tersebut telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal,

atau entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

SAK ETAP diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) karena penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dinilai terlalu rumit dan dapat mempersulit pengusaha berskala kecil dan menengah. SAK ETAP bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk membuat laporan keuangannya sendiri dan membantu dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal. Menurut (Martani, 2011), perusahaan kecil dan menengah diharapkan dapat menyusun laporan keuangannya sendiri yang didasarkan pada ETAP, dapat diaudit dan memperoleh opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk memperoleh dana untuk mengembangkan usahanya.

Tujuan laporan keuangan menurut SAK ETAP Bab 2 paragraf 1 adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dan dapat

meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tertentu. Untuk memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Usaha kecil dan menengah termasuk badan usaha koperasi merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi mempunyai sifat terbuka sehingga pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan adalah salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata

kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi selain sebagai bagian dari sistem pelaporan koperasi, juga bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi kepada anggota.

KSP BMT HPKJ yang berdiri sudah kurang lebih 8 tahun dalam melaksanakan kegiatannya belum menerapkan laporan akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik secara penuh. Penerapan SAK ETAP dalam koperasi Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu BMT HPKJ dalam menyelesaikan masalah ketidaklengkapan laporan keuangan koperasi. Selain itu juga sebagai rujukan untuk mengembangkan kemitraan.

Laporan keuangan yang dihasilkan KSP BMT Himpunan Pengusaha Kayu Jepara tahun 2014 hanya berupa laporan neraca dan laporan sisa hasil usaha, sedangkan laporan keuangan yang lengkap menurut SAK ETAP harus ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan neraca yang dibuat KSP BMT Himpunan Pengusaha Kayu Jepara tahun 2014, antara aset lancar dan aset tetap dijadikan satu begitu pula dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dengan demikian pencatatan aset dan kewajiban bertentangan

dengan SAK ETAP karena dalam SAK ETAP aset dicatat dalam neraca secara terpisah begitu juga dengan kewajiban. Dalam laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan KSP BMT Himpunan Pengusaha Kayu Jepara tahun 2014 masih ditemukan biaya-biaya yang belum dicatat, sedangkan dalam SAK ETAP menyatakan bahwa biaya pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal

Adanya kondisi dan permasalahan yang telah ditemukan peneliti saat melakukan penelitian pendahuluan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Model Implementasi SAK ETAP pada Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jepara”. Dengan demikian *research question* penelitian ini adalah bagaimana model implementasi SAK ETAP pada BMT Himpunan Pengusaha Kayu Jepara-HPKJ, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui model implementasi SAK ETAP pada BMT Himpunan Pengusaha Kayu Jepara-HPKJ.

Kajian Literatur

Menurut Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 1974)

dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan rugi laba serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana.

Menurut SAK ETAP laporan keuangan terdiri atas Neraca, laporan Laba – Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, serta CaLK (Martani, 2011).

Pemakai informasi akuntansi adalah pihak internal dan eksternal yang meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Para pemakai informasi menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, diantaranya adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor, pelanggan, pemerintah dan masyarakat (IAI, 2012):

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (IAI, 2004: 1.2)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku

untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang memiliki 2 kriteria, yaitu: Tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Kriteria ETAP tersebut, bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu jika:

- Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal;
- Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/ pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Dalam literatur tentang perkoperasian, koperasi diartikan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam koperasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi sebagai landasan dalam pelaksanaannya (Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012).

Koperasi sebagai kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Sedangkan Kasmir (2012) menyatakan bahwa koperasi persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya bukan untuk memperoleh keuntungan (Kasmir, 2012).

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 Tahun 2009 pengertian koperasi adalah : “Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional” (IAI, 2009).

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar yang digunakan entitas yang tidak membutuhkan akuntabilitas publik, yaitu :

- a. tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan
- b. laporan keuangan dengan tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. Entitas tersebut telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan

pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau

- b. Entitas tersebut menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, Pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Tahun pajak 2011 adalah tahun pajak pertama kali bagi mayoritas wajib pajak untuk membuat Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2010. Mayoritas wajib pajak di Indonesia adalah entitas yang masuk dalam kategori ETAP ini, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Menurut SAK ETAP laporan keuangan yang lengkap meliputi :

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan merupakan unsur laporan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan dan merupakan cermin posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, liabilitas dan sisa sumber daya yang dapat diklaim oleh pemilik perusahaan pada tanggal tertentu (IAI, 2012).

- b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan

laporan yang menyajikan hasil usaha dari suatu perusahaan dalam jangka waktu atau periode akuntansi tertentu (IAI, 2012).

c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan :

1. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
2. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

d. Laporan arus kas, dan

Laporan arus kas merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan mengenai arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan

e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi lainnya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data primer. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari responden yang

meliputi informasi mengenai nama responden, posisi atau jabatan dan tanggapan responden mengenai penerapan SAK ETAP pada koperasi.

Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah catatan yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan :

1. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) yang merupakan proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam mencari informasi, penelitian melakukan dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan aloanamnesa (wawancara dengan keluarga responden).
2. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen ini berupa

proses pengumpulan data-data berupa dokumen, catatan dan arsip koperasi.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran dan penjabaran data yang diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan manajer/pihak yang bersangkutan serta melakukan analisis data sekunder. Penulis melakukan pengumpulan data berupa laporan keuangan. Setelah terkumpulnya data, kemudian menganalisis penerapan perlakuan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut, seperti penyusunan neraca dan laporan laba rugi dan juga mengenai kelengkapan atas laporan keuangannya berdasarkan SAK ETAP.

Berikut langkah-langkah analisis data pada studi kasus pada KSP BMT HPKJ- Jepara yaitu:

- a. Mengumpulkan jawaban/informasi dari hasil wawancara dan data berupa dokumen laporan keuangan, sejarah KSP BMT HPKJ- Jepara, struktur organisasi, dari pihak koperasi.
- b. Mengelompokkan dokumen tersebut untuk dikembangkan dan menyusun jawaban supaya lebih rinci.
- c. Membandingkan dan menganalisis laporan keuangan tersebut dengan SAK ETAP.

- d. Menyimpulkan dan membuat laporan dari semua data yang sudah disimpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara salah satu karyawan koperasi artha HPKJ yang bernama Sri Ayu Alianti, SE sebagai bagian keuangan mengatakan bahwa Koperasi artha HPKJ belum tahu apa itu SAK ETAP, sehingga dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan sesuai SAK ETAP, laporan keuangannya sudah pernah di audit oleh KAP, dan laporannya sudah dilaporkan ke Dinas koperasi Jepara. Menurut SAK ETAP laporan keuangan yang lengkap meliputi :

- 1) Neraca
- 2) Laporan laba rugi
- 3) Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan :
 - a. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - b. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- 4) Laporan arus kas, dan
- 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi lainnya.

Adapun dalam laporan keuangan Koperasi artha HPKJ yang ada dalam buku

RAT Tahun 2014 yang disajikan yaitu:
Neraca dan Laporan Laba Rugi.

a. Neraca

Dalam Neraca Koperasi artha HPKJ terdapat pos aktiva dan pasiva. Pada pos aktiva akun kas dan setara kas hanya mencantumkan kas saja, pada akun piutang usaha piutang lainnya memakai istilah pembiayaan modal kerja investasi dan lainnya, tidak terdapat akun persediaan, properti investasi, aset tidak berwujud, aset tetap berupa tanah dan bangunan, kendaraan, peralatan kantor, simpanan anggota, simpanan, simpanan berjangka, pinjaman yang diterima, kekayaan bersih rupa-rupa pasiva, SHU tahun lalu dan SHU Tahun berjalan.

b. Laba Rugi

Dalam penyajian laporan laba rugi Koperasi artha HPKJ terdapat pendapatan dan biaya. Pada akun pendapatan berupa : pendapatan jasa pembiayaan, pendapatan operasional dan pendapatan jasa penempatan. Pada akun biaya : beban jasa beban operasional lainnya, beban umum dan administrasi dan biaya beban lainnya.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam laporan keuangan Koperasi artha HPKJ tidak membuat laporan perubahan ekuitas secara jelas dan terperinci dan tidak ada dalam laporan keuangan yang disampaikan dalam laporan anggota tahunan, karena

dari hasil wawancara pada salah satu karyawan Koperasi artha HPKJ belum mengetahui apa itu SAK ETAP sehingga belum menerapkan pada laporan keuangannya.

d. Arus kas

Dalam laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi artha HPKJ belum ada penyajian tentang laporan arus kas, serta dari hasil wawancara salah satu karyawan Koperasi artha HPKJ belum tahu apa itu SAK ETAP sehingga belum menerapkan pada laporan keuangannya.

Laporan arus kas menurut SAK ETAP menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pada laporan keuangan Koperasi artha HPKJ tidak terdapat catatan atas laporan keuangan serta dari hasil wawancara salah satu karyawan Koperasi artha HPKJ belum tahu apa itu SAK ETAP sehingga belum menerapkan pada laporan keuangannya.

Catatan atas laporan keuangan

menurut SAK ETAP berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisa pada laporan keuangan Koperasi artha HPKJ dapat disimpulkan bahwa :

1. Pihak Koperasi artha HPKJ belum melakukan Penerapan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada penyusunan laporan keuangannya.
2. Laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi Koperasi artha HPKJ belum menyajikan laporan keuangan secara penuh. Dari kesimpulan ini maka laporan keuangan yang mengacu SAK ETAP menjadi terdiri dari neraca dan laporan perubahan modal, laba rugi, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
3. Berdasarkan pada hasil wawancara salah satu karyawan Koperasi artha HPKJ, sejauh ini karyawan belum memahami SAK ETAP, sehingga

dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan SAK ETAP.

Daftar Pustaka

- IAI. (2009). Standar Akuntansi Keuangan.
- IAI. (2012). Aplikasi Akuntansi Dasar Sesuai dengan PSAK Terkini. Jakarta.
- Kasmir. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Luh, N., Ariantini, G., Zukhri, A., & Meitriana, M. A. (2014). Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri.
- Martani, D. (2011). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- Nurdita, J. R. (2013). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Koperasi Yang Ada Di Kota Dumai. Unri.
- Salprida. (2013). Akuntansi Koperasi Berbasis Sak Etap Pada Koperasi Petani Karet Karya Harapan (KOPTAN-KKH) ROKAN HULU. *Uma ética Para Quantos?*, XXXIII(2), 81–87. <http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Tanugraha, J. (2012). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan, 1(3), 77–81.
- Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012. (2012).